

## ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN SOPPENG

Amrial<sup>1</sup>, Citra Ayu Sari<sup>2</sup>, Umrah T<sup>3</sup>

Program Studi Manajemen, STIE Lamappapoleonro Soppeng

e-mail : amrial@stie.ypls.ac.id<sup>1</sup>, citra31613@gmail.com<sup>2</sup>, umrah568@gmail.com<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, entrepreneur untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktifitas suatu negara atau wilayah. Penekanan pada investasi Sumber Daya Manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Pentingnya peranan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan tampak pada perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang mengalokasi investasi maupun belanja daerahnya. Kepentingan Sumber Daya Manusia ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa di dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan Sumber Daya Manusia. Berdasarkan hasil analisis Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap Pendapatan Perkapita (Y1) di Kabupaten Soppeng, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) tidak signifikan dalam menjelaskan dan mempengaruhi perubahan pendapatan per kapita (Y1) di Kabupaten Soppeng, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng, Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng, Pendapatan per Kapita (Y1) berpengaruh pada peningkatan mutu modal manusia, karena dengan meningkatnya Pendapatan per Kapita maka akan membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

Kata kunci: Fakto Peningkatan Mutu, Sumber Daya Manusia.

### ABSTRACT

*Human resources as one of the factors of production in addition to natural resources, capital, entrepreneurs to produce output. The higher the quality of human resources, the greater the efficiency and productivity of a country or region. The emphasis on investment in Human Resources is believed to be the basis for increasing the productivity of total production factors. The importance of the role of Human Resources in development appears in the attention of various parties such as the government and the private sector that allocates investment and regional expenditure. The importance of Human Resources does not necessarily result in a short time. So it is not surprising that in government budgets there is often a tug-of-war between investment in (physical) economic infrastructure and investment in the Human Resources development sector. Based on the analysis of Education Sector Government Expenditure (X1) has a significant effect and positive direction on Per capita Income (Y1) in Soppeng Regency, Government Expenditure in Health Sector (X2) is not significant in explaining and influencing changes in per capita income (Y1) in Soppeng Regency, Expenditure Education Sector Government (X1) has negative and insignificant effect on improving the quality of Human Resources in Soppeng Regency, Health Sector Government Expenditure (X2) has a significant effect and positive direction on improving the quality of Human Resources in Soppeng Regency, Per capita income (Y1) influences in improving the quality of human capital, due to the increase in income per capita it will open up greater opportunities for the community to obtain higher income.*

*Keywords: Factor of Quality Improvement, Human Resources.*

### 1. PENDAHULUAN

Pentingnya Sumber Daya Manusia dalam proses pembangunan di negara berkembang telah dibuktikan banyak studi. Namun ironis, di beberapa negara berkembang, tingginya pendapatan rumah tangga tidak selalu menjamin tingginya tingkat kesehatan. Karenanya modal manusia harus tetap

mendapatkan perhatian tersendiri, bahkan di dalam perekenomian yang tumbuh dengan cepat sekalipun. Namun perlu diperhatikan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dapat membantu keluarga untuk keluar dari jebakan lingkaran setan kemiskinan (Todaro, 2003: 405, dalam Sjafii, 2005).

Faktor lain yang memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi adalah pendidikan, dimana pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pengukuran Sumber Daya Manusia (*human capital*) bersama dengan kesehatan. Pendidikan dapat menunjang masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik (Todaro, 2006).

Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, terlepas dari hal-hal yang lain, kedua hal itu merupakan hal yang penting. Kesehatan merupakan inti dari kesejahteraan, dan pendidikan adalah hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya merupakan hal yang fundamental untuk membentuk kemampuan manusia yang lebih luas yang berada pada inti makna pembangunan (Todaro, 2006: 434).

Peranan investasi fisik dalam memacu pertumbuhan ekonomi sudah tidak perlu diragukan lagi. Sementara itu pendidikan dan kesehatan merupakan factor penting dalam perkembangan manusia sekaligus merupakan penentu dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini mengingat pendidikan dan kesehatan akan berdampak pada kualitas Sumber Daya Manusia (*human capital*) (Sjafii, 2005).

Mutu Sumber Daya Manusia menurut Mulyadi (2012), merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi. Pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan suatu mutu Sumber Daya Manusia baru dapat memberi hasilnya pada masa mendatang. Oleh karena itu, disini digunakan istilah "modal". Sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut Sumber Daya Manusia. Penggunaan istilah Sumber Daya Manusia juga menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia, yang merupakan suatu investasi. Karena Sumber Daya Manusia tak dapat diukur, kita tidak mempunyai jumlah Sumber Daya Manusia, tetapi yang dibicarakan mutunya.

Sehingga, dalam membicarakan mutu Sumber Daya Manusia satuan hitung yang paling mencerminkan hal tersebut adalah indeks pendidikan, dihitung berdasarkan dua komponen yaitu indeks melek huruf dan indeks rata-rata lama sekolah, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat pengetahuan manusia. Semakin meningkat indeks pendidikan manusia maka semakin tinggi pengetahuannya, dan semakin meningkat pula mutu Sumber Daya Manusia tersebut.

Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai sebagai aset pembangunan dan yang mampu menguasai teknologi dan ilmu

pengetahuan. Maka sangat diperlukan peran pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan. Karena pada dasarnya, pendidikan sangat erat kaitannya dengan kemampuan seseorang dan merupakan salah satu upaya dalam membangun watak bangsa.

Penduduk Indonesia yang berjumlah besar dapat menjadi modal pembangunan bila memiliki mutu yang memadai. Hal ini mengacu pada konsep bahwa manusia merupakan pelaku, pelaksana, dan penerima manfaat pembangunan. Artinya dengan mutu penduduk yang rendah, maka manusia akan lebih banyak berperan sebagai penerima manfaat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Perlu disadari bersama bahwa manusia tidak hanya sebagai penerima manfaat pembangunan. Disamping itu muncul juga bahwa pembangunan tidak hanya bisa tergantung pada sumber daya alam. Teknologi sebagai sumber daya pembangunan yang lain memang menjadi penting pula belakangan ini. Namun perkembangan dan pemanfaatan teknologi itu sendiri sangat tergantung pada manusia.

Pembangunan di Indonesia juga sudah semestinya mengandalkan Sumber Daya Manusia (*human capital*). Dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dalam arti kuantitas dan kualitas, maka tantangan di masa mendatang akan bisa diatasi dengan baik. Para ahli juga sepakat bahwa mutu Sumber Daya Manusia yang sekarang kita miliki masih perlu ditingkatkan, agar tantangan tersebut bisa teratasi dengan baik.

Kondisi umum pendidikan di Indonesia ditandai oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); sekitar 58 % dari tenaga kerja Indonesia hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau kurang, hanya 4 % yang berpendidikan tinggi. Prospek peningkatan kualitas SDM di masa yang akan datang pun terlihat suram. Rata-rata angka partisipasi pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi masih relative rendah yakni 56 % untuk SLTP, 32 % untuk SLTA dan 12 % untuk perguruan tinggi (Susenas, 2002).

Dalam laporan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, terkait analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, angka indeks pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan angka nasional masih relatif rendah. Dimana pada level nasional angka tersebut telah mencapai 79,64 sedangkan Sulawesi Selatan sebesar 76,31 pada tahun 2016 Nilai indeks pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu 2011-2016

memperlihatkan suatu gambaran yang sangat memperhatikan. Karena posisi bidang pendidikan masih berada di level bawah, hal ini dapat dilihat berdasarkan provinsi yang berada di kawasan Timur juga secara nasional. Pemerintah telah merespon baik akan hal ini dan terlihat sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 nilai indeks meningkat sebesar 2,75 poin sedangkan nasional hanya meningkat sebesar 1,79 poin. Angka ini memberikan gambaran bahwa ada keseriusan dari pemerintah untuk menaikkan indeks pendidikan. Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, *entrepreneur* untuk menghasilkan output. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia, maka semakin meningkat pula efisiensi dan produktifitas suatu negara atau wilayah. Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Penekanan pada investasi Sumber Daya Manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total. Tanah, tenaga kerja, modal fisik bisa saja mengalami *diminishing return*, namun ilmu pengetahuan tidak (Atmanti, 2005).

Pentingnya peranan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan tampak pada perhatian dari berbagai pihak seperti pemerintah maupun swasta yang mengalokasi investasi maupun belanja daerahnya. Kepentingan Sumber Daya Manusia ini tidak serta merta dapat dilihat hasilnya dalam jangka waktu singkat. Sehingga tidaklah heran bahwa di dalam anggaran pemerintah sering kali terjadi tarik-menarik antara investasi untuk infrastruktur ekonomi (fisik) dan investasi untuk sektor pembangunan Sumber Daya Manusia (Sjafii, 2005).

Lanjut menurut Sjafii (2005), di satu sisi pengeluaran investasi infrastruktur dibutuhkan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain diperlukan juga investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meningkatnya perbaikan Sumber Daya Manusia sebetulnya juga memberikan manfaat positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui tersedianya tenaga kerja yang berkualitas. Sehingga peran pemerintah pada sektor publik sangat diperlukan untuk pembangunan manusia, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lokal. Selama ini pengeluaran pembangunan pemerintah lokal masih terkonsentrasi pada bidang infrastruktur ekonomi dan belum memberikan perhatian yang memadai bagi bidang

pembangunan manusia.

Dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) tahun 2009 dikatakan bahwa dalam jangka pendek, walaupun tidak ada pertumbuhan ekonomi yang memuaskan, sebuah negara dapat meningkatkan pembangunan manusia yang cukup signifikan melalui pengeluaran publik yang direalisasikan dengan baik. Untuk itu, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan realisasi belanja pembangunan terutama disektor pendidikan dan kesehatan akan memberi pengaruh yang positif bagi perkembangan pembangunan manusia.

Menurut Irawan (2009), pendapatan per kapita berpengaruh positif terhadap perkembangan manusia Indonesia. Semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka semakin baik pula tingkat perkembangan manusia atau *human capital* di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa semakin makmur masyarakat, maka akan semakin banyak kesempatan untuk berinvestasi pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia walaupun tidak semua tingkat pendapatan dibelanjakan pada investasi *human capital* (tidak signifikan). Walaupun demikian, pengaruh pendapatan per kapita terhadap perkembangan manusia tidak signifikan disebabkan pendapatan per kapita bukan merupakan indikator kemakuran yang baik karena tidak menggambarkan pemerataan pendapatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembuktian empiris di Kabupaten Soppeng mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan serta pengaruh pendapatan per kapita terhadap peningkatan mutu modal manusia yang tercermin dalam indeks pendidikan.

### 1.1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng.
3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sector pendidikan terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng.

4. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sector kesehatan terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng.
5. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng.

### 1.2. Manfaat Penelitian

penelitian ini dapat memberikan kegunaan, antara lain:

1. Sebagai bahan masukan atau informasi kepada para pengambil kebijakan, terutama kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta instansi terkait, dalam menentukan langkah-langkah kebijakan agar dapat meningkatkan investasi Sumber Daya Manusia.
2. Bagi masyarakat ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan ilmu ekonomi pembangunan khususnya pada peningkatan mutu Sumber Daya Manusia.
3. Sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi para peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dengan memasukkan determinan atau variabel-variabel lain yang turut mempengaruhi peningkatan investasi Sumber Daya Manusia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Manusia Sebagai Modal Pembangunan

Salah satu tujuan jangka panjang dari pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia bersama-sama dengan teknologi dianggap sebagai keunggulan kompetitif untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Meskipun kemajuan teknologi mempunyai peranan yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam pembuatan kebijakan pengembangan teknologi mesti mempertimbangkan, antara lain sumber daya yang dimiliki serta tujuan dari pembangunan itu sendiri (Maasyirah, 2011).

Pembentukan modal manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan Sumber Daya Manusia karenanya dikaitkan dengan investasi Sumber Daya Manusia dan pengembangannya sebagai sumber yang kreatif dan produktif (Jhingan, 2002).

Menurut Maasyirah (2011) dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Sekarang makin disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan Sumber Daya Manusia yaitu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan suatu negara. Kebutuhan investasi pada pembentukan Sumber Daya Manusia di dalam perekonomian sangatlah penting, hal ini terlihat jelas bahwa walaupun impor modal fisik secara besar-besaran ternyata tidak mampu mempercepat laju pertumbuhan, karena sumber manusianya terbelakang.

Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan paradigma pembangunan berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Penekanan pada investasi manusia diyakini merupakan basis dalam meningkatkan produktivitas faktor produksi secara total (Maasyirah, 2011).

Ada tiga faktor produksi dalam pembangunan ekonomi. Ketiga faktor tersebut menurut ekonomi klasik, yaitu; tanah, pekerja, dan modal. Menurutnya tanah terdapat dalam jumlah yang tetap, tidak tergantung pada tingkat harganya. Artinya harga dapat naik turun, tetapi jumlah tanah yang ditawarkan tidak berubah. Sementara itu, jumlah pekerja relatif elastis terhadap tingkat upah. Bila upah naik melebihi tingkat subsistem maka jumlah penduduk (dan karenanya jumlah tenaga kerja) akan meningkat dengan cepat (Muliadi, 2012: 194).

Seperti halnya dengan tanah, sejumlah tenaga kerja "bermutu" tidak akan dapat menghasilkan output yang banyak. Tersedianya jumlah tenaga kerja atau penduduk dalam jumlah yang besar dan mutu yang rendah akan menyebabkan tersedianya output per kapita yang rendah. Oleh karena itu diusahakan penggalakan pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk. Dipihak lain diusahakan tenaga kerja yang jumlahnya relatif tidak besar itu adalah tenaga kerja yang mutunya tinggi. Jika tidak, mengecilnya jumlah tenaga kerja tidak otomatis memberikan output per kapita yang lebih tinggi. Produktivitas merupakan suatu pengukuran output. Pengukuran ini merupakan relatif (*output terhadap input*) untuk membedakan terhadap pengukuran absolut (*output*), yaitu dengan produksi total. Jadi untuk menghitung produktivitas harus diketahui lebih dulu produksi total. Tanpa mengetahui produksi total tidak akan dapat menghitung

produktivitas. Produktivitas pekerja pada suatu kemampuan maksimal seorang pekerja untuk menghasilkan output. Dalam kenyataannya, pekerja tersebut belum tentu memanfaatkan seluruh kemampuannya. Seberapa jauh dia memanfaatkan kemampuan diukur dengan angka efisiensi. Produktifitas semacam ini disebut produktifitas fisik.

Mutu tenaga kerja dikatakan meningkat bila dengan jumlah satuan pekerja yang sama dapat dicapai tingkat produktifitas yang lebih tinggi. Mutu tenaga kerja dapat meningkat karena tiga hal, yaitu: (a) sumber daya alam yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar dan atau mutu yang lebih tinggi, (b) sumber daya modal fisik tersedia dalam jumlah yang lebih banyak dan atau mutu yang lebih tinggi, dan (c) mutu manusia itu sendiri yang lebih tinggi.

Mutu Sumber Daya Manusia merupakan suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi. Pengorbanan (biaya) untuk menghasilkan suatu mutu Sumber Daya Manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa mendatang. Oleh karena itu, disini digunakan istilah "modal". Sumber daya manusia yang sudah mengalami pengolahan lebih lanjut disebut Sumber Daya Manusia. Penggunaan istilah Sumber Daya Manusia juga menyiratkan suatu perhatian pada pengolahan sumber daya manusia, yang merupakan investasi.

Mutu Sumber Daya Manusia berbeda dengan produktivitas. Peningkatan mutu modal manusia dapat menaikkan produktivitas. Tetapi kenaikan produktivitas belum tentu berasal dari kenaikan mutu Sumber Daya Manusia. Konsep mutu Sumber Daya Manusia juga mengacu pada kemampuan memproduksi.

Menurut Olgard (1968) dalam Muliadi (2012), terdapat tiga jenis perubahan mutu Sumber Daya Manusia, yaitu: (a) Efek tahunan, berarti semua pekerja mempunyai mutu Sumber Daya Manusia yang lebih tinggi dengan berjalannya waktu. Hal ini terjadi, misalnya karena peningkatan kesehatan yang diakibatkan adanya perbaikan lingkungan, (b) Efek kohor, pekerja yang lebih muda (kohor yang lebih muda) mempunyai mutu Sumber Daya Manusia yang lebih tinggi. Seperti halnya pendidikan yang lebih baik, dan (c) Efek usia, peningkatan usia dapat meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia seseorang bila usianya relatif masih muda. Pada usia yang relatif tua, peningkatan usia tersebut dapat menurunkan mutu Sumber Daya Manusia.

Manusia sebagai salah satu faktor produksi selain sumber daya alam, modal, dan *entrepreneur* untuk menghasilkan output. Semakin tinggi mutu sumber daya manusia dalam suatu negara maka semakin tinggi pula efisiensi dan produktifitas negara tersebut.

## 2.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesobroto, 1994).

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijakan pengeluarannya. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak mamadai. Melainkan harus memperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkatkan pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997).

Pemerintah Indonesia membagi pengeluaran pemerintah menjadi dua macam; *Pertama*, pengeluaran rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga, perlindungan kepada masyarakat miskin dan kurang mampu serta menjaga stabilitas perekonomian (Mangkoesobroto, 1994).

Menurut Putri (2009) anggaran belanja rutin memegang peranan penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintahan serta upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas yang pada gilirannya akan menunjang tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Besarnya dipengaruhi oleh berbagai langkah kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam rangka pengelolaan

keuangan negara dan stabilitas perekonomian seperti perbaikan pendapatan aparatur pemerintah, penghematan pembayaran bunga utang dan pengalihan subsidi agar lebih tepat sasaran. Kenaikan pengeluaran pemerintah biasanya dari pos belanja pegawai yang dialokasikan untuk menaikkan gaji pegawai dan pensiunan. Selain itu, juga terjadi pada pos pembayaran bunga utang luar negeri dan dalam negeri. Perbedaan karakteristik yang paling mendasar antara pinjaman dari dalam dan luar negeri yaitu pada saat implikasi di saat pengembalian.

### 2.3. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita, produk nasional bruto serta pendapatan per kepala memberikan petunjuk yang lebih umum mengenai standar hidup. Pendapatan, diukur dengan tingkat pendapatan riil per kapita berdasarkan kemampuan belanja dari suatu nilai mata uang, atau tingkat pengeluaran konsumsi rata-rata per kapita.

Secara makro pendapatan perkapita yaitu pendapatan yang diperoleh dari rata-rata tiap penduduk selama satu tahun. Pendapatan ini dihitung dari pendapatan nasional (GNP) secara keseluruhan dibagi dengan jumlah penduduk (Deliarnov, 1995). Tinggi rendahnya pendapatan per kapita penduduk tergantung pada jumlah penduduk. Beberapa kemungkinan yang terjadi berkaitan dengan pendapatan perkapita yaitu: (a) Jika GNP dari jumlah penduduk tetap naik maka pendapatan perkapita akan turun, (b) Jika GNP tetap, maka pendapatan perkapita akan berkurang, dan (c) Jika GNP bertambah, maka pendapatan per kapita akan berubah sesuai dengan perubahan jumlah penduduk.

Todaro (2006) mengemukakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan pendapatan per kapita yang cepat maka perlu dilakukan pembangunan wilayah sehingga mampu menyediakan dan memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, memperkecil disparitas kemakmuran antara daerah atau regional serta mendorong transformasi perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dan industri melalui pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia tapi dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian (*sustainable*).

Dalam makroekonomi, pendapatan merupakan fungsi dari konsumsi ditambah dengan tabungan (*saving*), sehingga kenaikan pendapatan akan mendorong kenaikan konsumsi baik berupa barang maupun jasa serta mendorong kenaikan tabungan. Semakin membaik pembangunan ekonomi di suatu daerah semakin tinggi tingkat pendapatan riil masyarakat rata-rata per kapita yang berarti semakin baik standar hidup atau mutu Sumber Daya Manusia di daerah tersebut.

## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian survey dengan menggunakan metode analisis Deskriptif, untuk memperoleh data yang valid tentang hal-hal yang diperlukan dalam penelitian.

Menurut Zikmund (1997) "metode penelitian survey adalah satu bentuk teknik penelitian di mana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, melalui pertanyaan-pertanyaan", menurut Gay & Diehl (1992) "metode penelitian survey merupakan metode yang digunakan sebagai kategori umum penelitian yang menggunakan kuesioner dan wawancara", sedangkan menurut Bailey (1982) "metode penelitian survey merupakan satu metode penelitian yang teknik pengambilan datanya dilakukan melalui pertanyaan – tertulis atau lisan".

### 3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya.

1. Mutu modal manusia yang diukur dari indeks pendidikan adalah penggabungan dari angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, yang merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat pengetahuan manusia, dalam satuan %.
2. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah dari APBD untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan/di sektor pendidikan dalam satuan milyar rupiah.
3. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah anggaran yang dikeluarkan pemerintah dari APBD untuk membiayai penyelenggaraan kesehatan/di sektor kesehatan dalam satuan milyar rupiah.
4. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau wilayah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara atau wilayah dengan jumlah penduduk negara atau wilayah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita dalam satuan rupiah.

### 3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka (*Library Research*), sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner. Periode data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2007 – 2016. Sebagai pendukung, digunakan buku

referensi, jurnal, surat kabar, skripsi serta dari *browsing website internet* yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### 3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:148). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data dari APBD, Badan Pusat Statistik (BPS) dan United Nation Development Programme (UNDP) berupa data angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, indeks pendidikan, pendapatan per kapita, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, serta pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Laporan Angkatan kerja Kabupaten Soppeng dari Badan Pusat Statistik

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi (Singarimbun, 1995:171). Sampel dalam penelitian ini adalah Data tahun 2007 s/d 2016.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah masing-masing untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan dan pendapatan per kapita terhadap Mutu Modal Manusia di Kabupaten Soppeng, digunakan metode regresi berganda.

Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data- data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode Ordinary Least Square (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat (Wagiono,1994).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Penyajian dan Analisis Data

Pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang agar penduduk dapat hidup layak. Tujuan tersebut dapat tercapai agar setiap orang dapat memperoleh peluang yang seluas- luasnya untuk hidup sehat dan panjang, untuk berpendidikan dan berketrampilan serta mempunyai pendapatan yang diperlukan untuk hidup.

Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi perlu dilakukan pembangunan manusia. Kualitas modal manusia dapat dicerminkan oleh pendidikan, kesehatan, dan ataupun indikator lainnya. Peningkatan kualitas modal manusia juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah, sehingga dapat meningkatkan kemajuan suatu daerah.

Secara teoritis pembangunan mensyaratkan adanya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. SDM ini dapat berperan sebagai faktor produksi tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Untuk mencapai SDM yang berkualitas dibutuhkan pembentukan modal manusia (*human capital*). Pembentukan modal manusia ini merupakan suatu proses untuk memperoleh sejumlah manusia yang memiliki karakter kuat yang dapat digunakan sebagai modal penting dalam pembangunan. Karakter ini dapat berupa tingkat keahlian dan tingkat pendidikan masyarakat.

Pentingnya modal manusia dalam pembangunan telah dimulai pada tahun 1960-an oleh pemikirannya Theodore Schultz tentang *investment in human capital*. Menurutnya pendidikan merupakan suatu bentuk investasi dalam pembangunan dan bukan merupakan suatu bentuk investasi. Dalam perkembangannya, Schultz memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan memposisikan manusia sebagai fokus dalam pembangunan telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya peningkatan keahlian/ keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja.

Untuk melihat perkembangan indeks pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2007-2016, dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 1Perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Soppeng periode 2007-2016

Tahun	Angka melek huruf (%)	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Indeks pendidikan (%)
2007	82,61	6,20	67,92
2008	82,30	6,30	68,87
2009	83,10	6,50	69,84
2010	83,60	6,50	70,25
2011	84,60	6,90	71,62
2012	84,60	6,80	71,60

2013	85,10	7,00	72,24
2014	86,67	7,30	73,90
2015	86,71	7,28	73,99
2016	86,99	7,29	74,18

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan ( Indeks Pembangunan Manusia, data diolah)

#### 4.2. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam realisasi APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu fungsi alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta.

Pendanaan terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung dengan berapa besar jumlah pengeluaran pemerintah yang dialokasikan melalui APBD, untuk menyediakan fasilitas umum yang diperlukan semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik termasuk bidang pendidikan dan kesehatan yang ada. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap peningkatan mutu modal manusia pada suatu negara atau wilayah:

Tabel 2. Realisasi APBD untuk Sektor Pendidikan dan Sektor Kesehatan Kabupaten Soppeng, tahun 2007-2016

Tahun	Pengeluaran Pemerintah sektor Pendidikan ( )	Pengeluaran Pemerintah sektor Kesehatan
2007	Rp. 19.765.347.987	Rp. 10.785.586.823
2008	Rp. 20.675.239.365	Rp. 12.354.786.242
2019	Rp. 22.678.485.176	Rp. 15.897.567.200
2010	Rp. 61.839.235.267	Rp. 18.787.556.155
2011	Rp. 71.959.497.190	Rp. 21.649.407.128
2012	Rp. 96.996.295.530	Rp. 25.516.192.592
2013	Rp. 123.075.040.434	Rp. 28.748.437.564
2014	Rp. 156.684.618.182	Rp. 24.979.268.611
2015	Rp. 245.546.703.006	Rp. 28.318.514.070
2016	Rp. 298.648.013.901	Rp. 32.586.248.266

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

#### Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah responden perempuan lebih banyak atau sebagian besar responden pada penelitian ini adalah perempuan yakni 53%,sedangkan responden laki-laki sebesar 47%.Ini berarti sumberdaya perempuan lebih besar dibanding laki-laki sehingga pimpinan harus mampu memanfaatkan potensi pegawai perempuan.

Tabel 2. Data Jenjang Pendidikan Responden

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Prosentase
1.	SLTA	5	9
2.	D3	3	5
3.	S1	42	75
4.	S2	6	11
5.	S3	-	-
	Jumlah	56	100

Sumber : Olahan Data Primer, 2017

#### 4.3 Pendapatan Per Kapita

Peningkatan mutu modal manusia tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan akan mendorong kemampuan untuk meningkatkan konsumsi barang dan jasa. Sehingga peningkatan konsumsi akan berdampak pada peningkatan seseorang untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik ataupun pemenuhan gizi dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Untuk melihat perkembangan pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng periode 2007-2016, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. Pendapatan per Kapita Kabupaten Soppeng tahun 2007-2016

TAHUN	PENDAPATAN PER KAPITA
2007	Rp. 3.758.525
2008	Rp. 3.875.830
2009	Rp. 3.897.429

2010	Rp. 4.195.865
2011	Rp. 4.403.754
2012	Rp. 4.718.068
2013	Rp. 5.012.040
2014	Rp. 5.396.980
2015	Rp. 5.768.119
2016	Rp. 6.196.182

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Selatan

#### 4.4. Pembahasan

Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng periode 2007-2016 dan seberapa besar pengaruh variabel-variabel independent tersebut mempengaruhi pendapatan per kapita di Kabupaten Soppeng, maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program EViews 7.0. Hasil persamaan regresi antara pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X1), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X2), terhadap pendapatan per kapita (Y1) di Kabupaten Soppeng periode 2007-2016 adalah:

$$\ln = 12.02440 + 0.181249 - 0.051247 + \dots \quad (3.3.1.1)$$

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap Pendapatan Perkapita (Y1) di Kabupaten Soppeng.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) tidak signifikan dalam menjelaskan dan mempengaruhi perubahan pendapatan per kapita (Y1) di Kabupaten Soppeng.
3. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng.

4. Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan (X2) berpengaruh signifikan dan arahnya positif terhadap peningkatan mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Soppeng.
5. Variabel Pendapatan per Kapita (Y1) berpengaruh pada peningkatan mutu modal manusia, karena dengan meningkatnya Pendapatan per Kapita maka akan membuka peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo, 2013. *Teori-teori Pembangunan Ekonomi*, edisi pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Atmanti, Hastarini Dwi, 2005. *Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan*, Jurnal Dinamika Pembangunan.
- Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan, 2012. *Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan 2011*. Makassar, Areso Makassar.
- Basri, Zainul Yuswar dan Mulyadi Subri, 2005. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta, Rajawali Press.
- Bastias, Desi Dwi, 2010. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah atas Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Skripsi.
- Badan Pusat Statistik, 2002. *Survei Sosial – Ekonomi Nasional (Susenas, 2002)*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, 2011. *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010*, BPS Sulawesi Selatan, Makassar, Areso Makassar.
- Bailey, A. J., Light, N. D.(1989). *Connective tissue in meat and meat products*. (1st ed.). Elsevier Science Publishers, Essex.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Indikator Sosial Ekonomi Sulawesi Selatan Tahun 2006*, BPS Sulawesi Selatan, Makassar, Areso Makassar.
- Brata, Aloysius Gunadi, 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, Dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian –

- 
- Universitas Atma Jaya. Jawa Tengah. Tesis. Universitas Negeri Semarang
- Deliarnov, 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dumairy, 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbitan Erlangga. Gujarati, Damodar, 2003. *Basic Econometrics, Fourth Edition*. McGraw-Hill Companies, New York.
- H. A. R. Tilaar. 2000. *Pendidikan abad ke-21 Menunjang Knowledge-Based Economy*. Analisis CSIS. Tahun XXIX/2000, No. 3, Jakarta, Hlm: 257-285.
- Imam Ghozali, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BP Undip: Semarang.
- Irawan, Yoga, 2009. *Analisis Pengaruh Modal Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Perbedaan Pertumbuhan Regional, dan Perkembangan Ukuran Provinsi di Indonesia, Serta Faktor-Faktor Determinasinya*. Depok: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Skripsi.
- Jhingan, M.L., 2002, *Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian*, Jakarta : PT. Raya Grafindo Persada
- Lanjouw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow, 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?* World Bank Working Paper No. 2739. Washington. World Bank
- Maasyirah. 2011. *Analisis Mutu Modal Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2000-2009*. Makassar: Skripsi Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Mangkoesebroto, Guritno, 1994, "Kebijakan Publik Indonesia Substansi dan Urgensi", Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Mankiw N. Gregory. 2007. *Macro Ekonomi*, Edisi ke-6. Jakarta: Erlangga
- Mulyadi. 2012. *Akuntansi Biaya*. Edisi ke-5. Cetakan Kesebelas. Yogyakarta: STIM YKPN
- Putri. (2009). Hubungan antara motivasi berprestasi dengan *fear of success* pada wanita bekerja dewasa muda. Bekasi: ([http://www. Jurnal pdf.com](http://www.jurnal.pdf.com))
- Rustiono, Deddy. 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi*